

**LAPORAN
MONITORING, EVALUASI DAN
TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA
PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2025**



**PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
TAHUN 2025**

LAPORAN MONITORING, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT
CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
TRIWULAN I TAHUN 2025

I. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Keenam Pasal 18 dan 19;
- b. Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditanda tangani sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) kedalam satu rencana aksi yang lebih detail dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.
- c. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
- d. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya

II. Capaian Kinerja

Hasil pengukuran capaian kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Periode Triwulan I Tahun 2025:

No	Sasaran		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	89%	93%	105%
		2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	95%	100%	105%
		3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	53%	54%	103%
		4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para	72%	71%	99%

			pihak			
	5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	92%	100%	108%	
	6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45%	25%	56%	
	7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	12%	N/A	N/A	
	8	Persentase pekar yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	3%	3%	106%	
	9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	47%	100%	213%	
	10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	95%	100%	105%	
	11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	94%	98%	104%	
	12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95%	100%	105%	
Rata - Rata Capaian Sasaran Strategis I					109%	
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	94%	99%	105%
Rata - Rata Capaian Sasaran Strategis II					105%	
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83	N/A	N/A
		2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	99	100	101

3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	97	100	103
4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	100	100	100
5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	78	78	100
6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	100
Rata - Rata Capaian Sasaran Strategis III				100%
Rata - Rata Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025				104%

III. Analisa Capaian Kinerja

1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

1.1 Indikator persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

Indikator kinerja “Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Berikut rincian perkara yang diselesaikan tepat waktu periode triwulan I tahun 2025 :

Bulan	Jumlah perkara yang diselesaikan dibulan ini	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tidak tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
Januari	227	212	15	89%	94%	106%
Februari	216	198	18	89%	92%	104%
Maret	228	215	13	89%	94%	106%
Jumlah	671	625	46	89%	93%	105%

Capaian indikator persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu selalu mencapai 105% Pada periode triwulan I tahun 2025, jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 671 perkara dan seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu. Realisasi persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu mencapai 93% dan melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 89%. Hal ini menunjukkan Pengadilan Negeri Pekanbaru telah bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan

Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dan konsisten mewujudkan proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.

1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Indikator kinerja “Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak” adalah perbandingan jumlah Salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus.

Capaian Indikator Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak selalu mencapai 106% setiap bulannya. Pada periode triwulan I tahun 2025, jumlah perkara yang diputus sebanyak 598 perkara dan seluruh salinan putusan perkara tersebut dikirimkan kepada pengadilan pengaju secara tepat waktu. Hal ini menunjukkan terwujudnya penyelesaian perkara secara sederhana, efektif, transparan, tepat waktu, akuntabel, responsif dan modern pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Bulan	Perkara yang diputus bulan Ini	Jumlah Salinan Putusan Yang Tersedia/Dikirimkan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu	Jumlah salinan putusan perkara yang dikirimkan kepada pengadilan pengaju tidak tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
Januari	175	175	0	95%	100%	105%
Februari	205	205	0	95%	100%	105%
Maret	218	218	0	95%	100%	105%
Jumlah	598	598	0	95%	100%	105%

1.3 Presentase pengiriman pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan pk secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.

Indikator Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.

Capaian Indikator pengiriman pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan pk secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak mencapai 103% pada periode triwulan I tahun 2025.

Bulan	Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan pk yang di terima pengadilan pengaju	jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi pk yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu	jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi pk yang disampaikan kepada para pihak secara tidak tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
Januari	29	19	10	53%	66%	124%
Februari	30	28	2	53%	94%	176%
Maret	33	3	30	53%	9%	17%
Jumlah	76	50	42	53%	54%	103%

1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan pk tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Indikator kinerja “Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak” adalah perbandingan jumlah Salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah Salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju.

Bulan	Jumlah Salinan Putusan Banding, Kasasi Dan PK Yang Diterima Pengadilan Pengaju	Jumlah salinan putusan yang di kirimkan kepada para pihak secara tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan Yang Dikirimkan Kepada Para Pihak Secara tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
Januari	22	17	5	72%	77%	107%
Februari	26	27	1	72%	104%	144%
Maret	18	3	15	72%	17%	23%
Jumlah	66	47	21	72%	71%	99%

Capaian Indikator persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak mencapai 99% pada periode triwulan I tahun 2025.

Capaian tersebut didukung oleh karena adanya evaluasi dan monitoring secara berkala, dan karena adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara majelis hakim, panitera pengganti, dan bagian kepaniteraan.

1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Indikator kinerja “Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan” adalah perbandingan antara jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dengan jumlah putusan yang telah diminutasi.

Bulan	Jumlah putusan yang telah diminutasi tahun 2025	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan tahun 2025	Jumlah putusan yang tidak diunggah pada direktori putusan tahun 2025	Target	Realisasi	Capaian
Januari	192	192	0	92%	100%	109%
Februari	216	213	3	92%	99%	108%
Maret	228	228	0	92%	100%	109%
Jumlah	636	633	3	92%	100%	108%

Capaian indikator Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan pada Triwulan I Tahun 2025 mencapai 109%. Selama periode januari sampai dengan maret 2025, Pengadilan mengunggah sebanyak 636 putusan ke Direktori Putusan. Dari jumlah tersebut, 633 putusan diunggah secara tepat waktu dan 3 putusan diunggah tidak tepat waktu. Realisasi indikator mencapai 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 92%, sehingga capaian kinerja mencapai 109%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan telah melaksanakan publikasi putusan secara optimal dan konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.6. Presentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata

Indikator kinerja “Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata” adalah perbandingan antara jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan dengan jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi.

Bulan	Jumlah Putusan Perdata Yang Dimohonkan Eksekusi	Jumlah Permohonan Eksekusi Putusan Perdata Yang Diselesaikan	Jumlah Permohonan Eksekusi Putusan Perdata Yang Tidak Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
Januari	6	3	3	45%	50%	112%
Februari	7	0	7	45%	0%	0%
Maret	3	1	2	45%	34%	76%
Jumlah	16	4	12	45%	25%	56%

Capaian indikator Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata pada Triwulan I Tahun 2025 mencapai 63%. terdapat 16 permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan, dengan 4 permohonan diselesaikan tepat waktu dan 12 permohonan diselesaikan tidak tepat waktu. Realisasi indikator mencapai 84% dengan target yang ditetapkan sebesar 45%, sehingga capaian kinerja mencapai 63%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pengadilan dalam penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata telah melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh adanya monitoring dan evaluasi secara berkala.

1.7. Persentase perkara yang diselesaikan melalui pendekatan restorative

Indikator kinerja “Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Pendekatan Restorative” adalah perbandingan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dengan jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restorative

Bulan	Jumlah Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	Jumlah Perkara Yang Memenuhi Kriteria Penerapan Pendekatan Keadilan Restorative	Jumlah Perkara Yang tidak Memenuhi Kriteria Penerapan Pendekatan Keadilan Restorative	Target	Realisasi	Capaian
Januari	0	0	0	12%	N/A	N/A
Februari	0	0	0	12%	N/A	N/A
Maret	0	0	0	12%	N/A	N/A
Jumlah	0	0	0	12%	N/A	N/A

Capaian indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Pendekatan Restorative pada Triwulan I Tahun 2025 mencapai 0%. tidak terdapat perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dan tidak terdapat perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif. Dengan demikian, realisasi indikator mencapai 0% dari target yang telah ditetapkan sebesar 12%, sehingga capaian kinerja juga mencapai 0%. Tidak tercapainya target indikator ini disebabkan oleh tidak adanya perkara yang memenuhi persyaratan dan kriteria untuk diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif selama periode pelaporan.

1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Indikator kinerja “Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi” adalah perbandingan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi.

Bulan	jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi Th. 2025	jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	jumlah perkara yang tidak berhasil mediasi	Target	Realisasi	Capaian
Januari	17	0	17	3%	0%	0%
Februari	26	2	24	3%	8%	267%
Maret	20	0	20	3%	0%	0%
Jumlah	63	2	61	3%	3%	106%

Capaian indikator Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi pada Triwulan I Tahun 2025 mencapai 106%. terdapat 63 perkara yang wajib dilakukan mediasi, dengan 2 perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi dan 61 perkara tidak berhasil diselesaikan melalui mediasi. Realisasi indikator mencapai 3% dengan target yang ditetapkan sebesar 3%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi masih relatif kecil dibandingkan jumlah perkara yang wajib dimediasi, realisasi yang dicapai telah melampaui target yang ditetapkan.

1.9. Presentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi

Indikator kinerja “Persentase Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi” adalah perbandingan antara jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi. Indikator ini untuk mengukur jumlah perkara anak yang diselesaikan dengan diversi.

Bulan	jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi	jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi	jumlah perkara anak yang tidak berhasil diversi	Target	Realisasi	Capaian
Januari	0	0	0	47%	N/A	N/A
Februari	1	1	0	47%	100%	3%
Maret	0	0	0	47%	N/A	N/A
Jumlah	1	1	0	47%	100%	213%

Capaian indikator Persentase Perkara Anak yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi pada Triwulan II Tahun 2025 mencapai 1%. terdapat 1 perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi. realisasi indikator ini 1% dari target yang telah ditetapkan sebesar 47%. Sehingga capaiannya 3%.

1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court

Indikator kinerja “Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Menggunakan E-Court” adalah perbandingan antara jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court dengan jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan.

Bulan	Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Diajukan	Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Diajukan Melalui E-Court	Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Diajukan secara manual	Target	Realisasi	Capaian
Januari	76	76	0	95%	100%	105%
Februari	101	101	0	95%	100%	105%
Maret	117	117	0	95%	100%	105%
Jumlah	294	294	0	95%	100%	105%

Capaian indikator Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang Menggunakan E-Court pada Triwulan I Tahun 2025 mencapai 106%. terdapat 294 perkara perdata tingkat pertama yang diajukan, dan seluruhnya sebanyak 294 perkara diajukan melalui E-Court. Dengan demikian, realisasi indikator mencapai 100% dan telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 95%

1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)

Indikator kinerja “Persentase Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)” adalah perbandingan antara jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dengan jumlah perkara pidana yang dilimpahkan. Aplikasi e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

Bulan	Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan	Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik	Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara manual	Target	Realisasi	Capaian
Januari	127	123	4	94%	97%	103%
Februari	108	103	5	94%	95%	101%
Maret	176	175	1	94%	99%	106%
Jumlah	411	401	10	94%	98%	104%

Capaian indikator Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu) pada Triwulan I Tahun 2025 mencapai 104%.terdapat 411 perkara pidana yang dilimpahkan, dengan 401 perkara dilimpahkan secara elektronik melalui E-Berpadu dan 10 dilimpahkan secara manual yakni perkara tindak pidana cepat. Realisasi indikator mencapai 98% target yang ditetapkan sebesar 94%

1.12.Persentase layana perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- berpandu)

Indikator kinerja “Persentase Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu)” adalah perbandingan antara jumlah layanan perkara yang diajukan secara elektronik dengan jumlah layanan perkara pidana.

Bulan	jumlah layanan perkara pidana	jumlah layanan perkara yang diajukan secara elektronik	jumlah layanan perkara yang diajukan secara manual	Target	Realisasi	Capaian
Januari	280	280	0	95%	100%	105%
Februari	377	377	0	95%	100%	105%
Maret	471	471	0	95%	100%	105%
Jumlah	1.128	1.128	0	95%	100%	105%

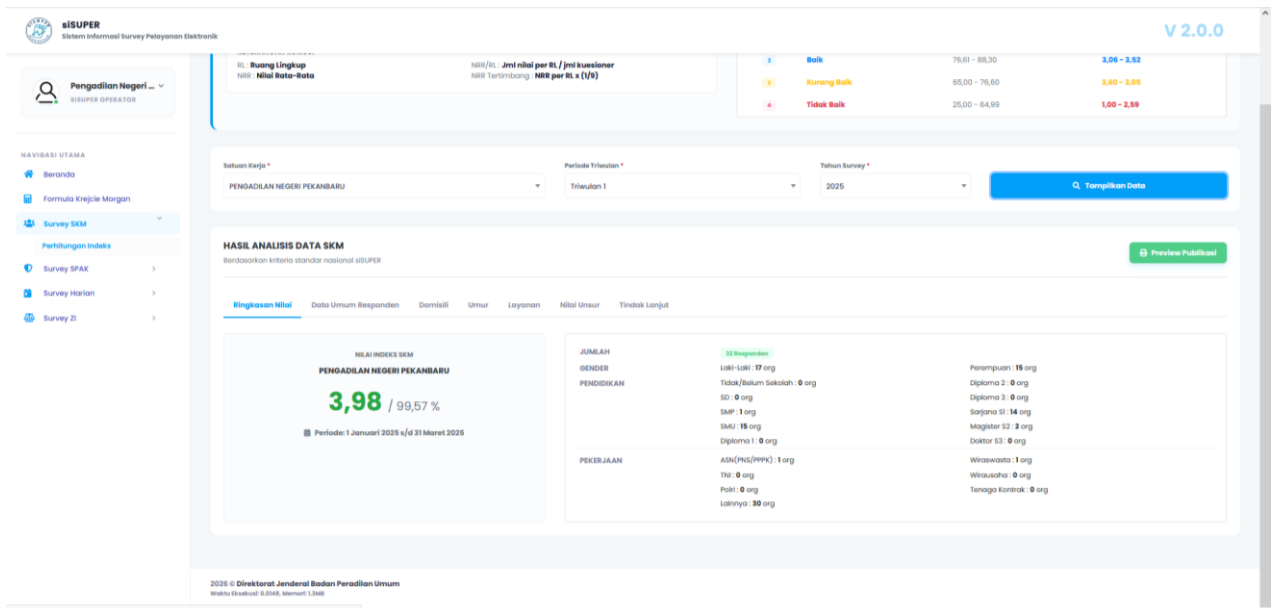
Capaian indikator Persentase Layanan Perkara Pidana yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu) pada Triwulan I Tahun 2025 mencapai 106%. seluruh layanan perkara pidana yang diajukan telah menggunakan aplikasi E-Berpadu. Seluruh layanan perkara pidana diajukan secara elektronik, sehingga capaian indikator 106% dengan target yang ditetapkan sebesar 95%.

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan berpedoman pada Permenpan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai indeks minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus ≥ 80 . Pengukuran menggunakan aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER) dilaksanakan per triwulan.

Pada Periode Triwulan I Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pekanbaru mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 99% dan melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar 94%. Capaian kinerja indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan adalah sebesar 105%, hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar layanan yang ditetapkan dan ketentuan peraturan perundangan - undangan yang mengaturnya.



3. Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Negeri Pekanbaru

Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Negeri Pekanbaru menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dilaksanakan per tahun dan berpedoman pada Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:

- 1) Kompetensi (40%)
- 2) Kinerja (30%)
- 3) Kualifikasi (25%)
- 4) Disiplin (5%)

3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Pekanbaru DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Pengukuran Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Pekanbaru DIPA (01) Badan Urusan Administrasi menggunakan aplikasi *My Integrated Treasury System (MyIntress)* Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dilaksanakan per triwulan dan berpedoman pada Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan yang terdiri dari:

- 1) Revisi DIPA (10%)
- 2) Penyerapan Anggaran (20%)
- 3) Penyelesaian Tagihan (10%)
- 4) Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)
- 5) Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)
- 6) Belanja Kontraktual (10%)

7) Pengelolaan UP dan TUP (10%)

8) Capaian Output (25%)

Pada Periode Triwulan I Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pekanbaru mendapatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Pekanbaru DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebesar 100 dan melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar 99. Capaian kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Pekanbaru DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebesar 101, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran Pengadilan Negeri Pekanbaru telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

MyIntress

Cari Menu, contoh: Daftar Buku Besar

Tahun Anggaran: 2025

FIRANDA AL SATKER-098849

Admin

Anggaran

Komitmen

Bendahara

Pembayaran

Persediaan

Aset Tetap

Piutang

Rekonsiliasi

Akuntansi dan Pelaporan

Tematik

Referensi

Indikator Pelaksanaan Anggaran Satker

Filter

PDF

XLSX

FILTER AKTIF: PERIODE: 03

cari di halaman...

NO	PERIODE	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENURUNAN)	NILAI AKHIR NILAI TOTAL (KONVERSI BOBOT)
							REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN 3 DIPA	NILAI ASPEK	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	NILAI ASPEK	CAPAIAN OUTPUT				
1	03 Maret	008	005	098849	PENGADILAN NEGERI PEKANBARU	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	100,00 10 10,00	100,00 25 25,00	100,00	80,00	80,00%	0,00	100,00

3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Pekanbaru DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Pengukuran Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Pekanbaru DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menggunakan aplikasi *My Integrated Treasury System (MyIntress)* Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dilaksanakan per triwulan dan berpedoman pada Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan yang terdiri dari:

- 1) Revisi DIPA (10%)
- 2) Penyerapan Anggaran (20%)
- 3) Penyelesaian Tagihan (10%)
- 4) Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)
- 5) Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)
- 6) Belanja Kontraktual (10%)
- 7) Pengelolaan UP dan TUP (10%)
- 8) Capaian Output (25%)

Pada Periode Triwulan I Tahun 2026, Pengadilan Negeri Pekanbaru mendapatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Pekanbaru DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebesar 100 dan melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar 97. Capaian kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Pekanbaru DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah sebesar 103, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran Pengadilan Negeri Pekanbaru telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

MyIntress

Cari Menu, contoh: Monitoring Kuitansi Belum SPU > 30 Hrs

Tahun Anggaran: 2025

FIRANDA AL SATKER -099214

Admin

Anggaran

Komitmen

Bendahara

Pembayaran

Persediaan

Aset Tetap

Piutang

Rekonsiliasi

Akuntansi dan Pelaporan

Tematik

Referensi

Indikator Pelaksanaan Anggaran Satker

FILTER AKTIF: PERIODE: 03

FILTER

PDF

XLSX

carri di halaman...

NO	PERIODE	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANGAN)	NILAI AKHIR NILAI TOTAL(KONVERSI BOBOT)
							REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN II DIPA	NILAI ASPEK	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	NILAI ASPEK	CAPAIAN OUTPUT				
1	03 Maret	008	005	099214	PENGADILAN NEGERI PEKANBARU	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	100,00 10 10,00	100,00 25 25,00	100,00	80,00	80,00%	0,00	100,00

3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Negeri Pekanbaru DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Pengukuran Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Negeri Pekanbaru DIPA (01) Badan Urusan Administrasi menggunakan aplikasi *Money Kemenkeu* Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dilaksanakan per tahun dan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan yang terdiri dari:

- 1) Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:
 - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)
 - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)
 - Agregasi Capaian RO Satker (30%)
- 2) Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker

3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Negeri Pekanbaru DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Pengukuran Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Negeri Pekanbaru DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menggunakan aplikasi *Money Kemenkeu* Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dilaksanakan per tahun dan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan yang terdiri dari:

- 1) Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:
 - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)
 - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)
 - Agregasi Capaian RO Satker (30%)
- 2) Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker

3.6 Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Negeri Pekanbaru

Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. Pengukuran Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Negeri Pekanbaru menggunakan aplikasi *e-Sadewa* Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dilaksanakan per tahun dan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan

IV. Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagian besar target sudah tercapai dengan baik yakni diatas 100%, **namun masih ada indikator kinerja yang harus ditingkatkan realisasinya agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan.**

Sebagai tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru tetap melaksanakan pengendalian dan pemantauan secara berkala terhadap capaian Indikator Kinerja Utama guna memastikan konsistensi pencapaian target pada triwulan berikutnya. Monitoring dilakukan melalui evaluasi internal, rapat koordinasi, serta pengawasan masing-masing bagian.

V. Kesimpulan

Laporan Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Triwulan I Tahun 2025 menyajikan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang menggunakan alat ukur 12 (dua belas) indikator pada Sasaran I: Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern, dan 1 (satu) indikator pada Sasaran II: Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik dan 6 (enam) indikator pada Sasaran III: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Secara umum, rata-rata capaian seluruh indikator kinerja dinyatakan “Berhasil” yakni 104% karena dapat mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan ada beberapa indikator kinerja yang melampaui target. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain: adanya kebijakan, peningkatan fungsi pengawasan, peningkatan sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang.

VI. Rekomendasi

Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar selalu berupaya : Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap *stakeholder* komponen aparatur peradilan, masyarakat, dan *civil society* sebagai bahan integral dari pengadilan, penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara, Penguatan organisasi guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan dalam mengatasi kendala dan permasalahan yang ada.

Demikian Laporan Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut Capaian Kinerja Triwulan I tahun 2025 dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Pekanbaru, 6 April 2025

Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru,

Raden Heru Kuntodewo

**LAPORAN
MONITORING, EVALUASI DAN
TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA
PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2025**



**PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
TAHUN 2025**

LAPORAN MONITORING, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT
CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
TRIWULAN II TAHUN 2025

I. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Keenam Pasal 18 dan 19;
- b. Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditanda tangani sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) kedalam satu rencana aksi yang lebih detail dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.
- c. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
- d. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya

II. Capaian Kinerja

Hasil pengukuran capaian kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Periode Triwulan II Tahun 2025:

No	Sasaran		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	89%	92%	103%
		2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	95%	100%	105%
		3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	53%	47%	89%
		4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK	72%	71%	98%

			tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak			
	5		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	92%	99%	108%
	6		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45%	76%	170%
	7		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	12%	N/A	N/A
	8		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	3%	3%	115%
	9		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	47%	0%	0%
	10		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	95%	100%	105%
	11		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	94%	99%	105%
	12		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95%	100%	105%
	Rata - Rata Capaian Sasaran Strategis I					100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	94%	99%	105%
Rata - Rata Capaian Sasaran Strategis II					105%	
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83	N/A	N/A
		2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	99	99%	100%

3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	97	97%	100%
4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	100	N/A	N/A
5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	78	N/A	N/A
6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	N/A	N/A
Rata - Rata Capaian Sasaran Strategis III				100%
Rata - Rata Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025				101%

III. Analisa Capaian Kinerja

1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

1.1 Indikator persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

Indikator kinerja “Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Berikut rincian perkara yang diselesaikan tepat waktu periode triwulan II tahun 2025 :

Bulan	Jumlah perkara yang diselesaikan dibulan ini	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tidak tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
April	128	112	16	89%	87%	97%
Mei	215	202	13	89%	93%	97%
Juni	206	190	16	89%	92%	103%
Jumlah	549	504	45	89%	92%	103%

Capaian indikator persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu selalu mencapai 103% Pada periode triwulan II tahun 2025, jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 549 perkara dan 504 perkara dapat diselesaikan tepat waktu. Realisasi persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu mencapai 92% dan melebihi dari target yang telah ditetapkan

sebesar 89%. Hal ini menunjukkan Pengadilan Negeri Pekanbaru telah bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dan konsisten mewujudkan proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.

1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Indikator kinerja “Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak” adalah perbandingan jumlah Salinan putusan yang tersedia/dikirmkan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus.

Bulan	Perkara yang diputus bulan Ini	Jumlah Salinan Putusan Yang Tersedia/Dikirmkan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu	Jumlah salinan putusan perkara yang dikirimkan kepada pengadilan pengaju tidak tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
April	128	112	16	95%	87%	91%
Mei	215	202	13	95%	93%	97%
Juni	206	190	16	95%	92%	96%
Jumlah	549	504	45	95%	100%	105%

Capaian Indikator Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak mencapai 105% setiap bulannya. Pada periode triwulan II tahun 2025, Hal ini menunjukkan terwujudnya penyelesaian perkara secara sederhana, efektif, transparan, tepat waktu, akuntabel, responsif dan modern pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan pk secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.

Bulan	jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan pk yang diterima pengadilan pengaju	jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi pk yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu	jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi pk yang disampaikan kepada para pihak secara tidak tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
April	29	15	14	53%	52%	98%
Mei	35	15	17	53%	43%	81%
Juni	50	24	26	53%	48%	91%
Jumlah	92	50	42	53%	47%	89%

Capaian indikator persentase penyampaian pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK kepada para pihak secara tepat waktu mencapai 89% pada periode Triwulan II Tahun 2025. Dari 92 petikan atau amar putusan banding, kasasi, dan PK yang diterima pengadilan pengaju, sebanyak 50 putusan telah disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dan 42 putusan disampaikan tidak tepat waktu. Realisasi persentase penyampaian pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK kepada para pihak secara tepat waktu mencapai 47% dan melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 53%.

Capaian tersebut didukung oleh adanya evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap penyampaian relaas pemberitahuan putusan, peningkatan koordinasi antara majelis hakim, panitera pengganti, jurusita/jurusita pengganti, serta kepaniteraan sehingga proses penyampaian pemberitahuan putusan kepada para pihak dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan tepat waktu.

1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan pk tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Indikator kinerja “Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak” adalah perbandingan jumlah Salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah Salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju.

Bulan	Jumlah Salinan Putusan Banding, Kasasi Dan PK Yang Diterima Pengadilan Pengaju	Jumlah Salinan Putusan Yang Dikirimkan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu	Jumlah Salinan Putusan Yang Dikirimkan Kepada Para Pihak Secara Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
April	17	14	3	72%	83%	116%
Mei	25	13	12	72%	52%	73%
Juni	30	24	6	72%	80%	112%
Jumlah	72	51	21	72%	71%	98%

Capaian indikator persentase penyampaian salinan putusan banding, kasasi, dan PK kepada para pihak secara tepat waktu pada Triwulan II Tahun 2025 mencapai 98%. Selama periode April sampai dengan Juni 2025, Pengadilan menerima sebanyak 72 salinan putusan banding, kasasi, dan PK. Dari jumlah tersebut, sebanyak 51 salinan putusan berhasil disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dan 21 salinan putusan disampaikan tidak tepat waktu. Realisasi indikator mencapai 71% dengan target yang ditetapkan sebesar 72%, sehingga capaian kinerja mencapai 98%.

1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Indikator kinerja “Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan” adalah perbandingan antara jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dengan jumlah putusan yang telah diminutasi.

Bulan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan tahun 2025	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori secara tepat waktu	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori secara tidak tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
April	128	128	0	92%	100%	109%
Mei	215	212	3	92%	102%	109%
Juni	206	205	1	92%	101%	110%
Jumlah	549	545	4	92%	99%	108%

Capaian indikator Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan pada Triwulan II Tahun 2025 mencapai 108%. Selama periode April sampai dengan Juni 2025, Pengadilan mengunggah sebanyak 549 putusan ke Direktori Putusan. Dari jumlah tersebut, 545 putusan diunggah secara tepat waktu dan 4 putusan diunggah tidak tepat waktu. Realisasi indikator mencapai 99% dengan target yang ditetapkan sebesar 92%, sehingga capaian kinerja mencapai 108%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan telah melaksanakan publikasi putusan secara optimal dan konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku

1.6 Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata

Indikator kinerja “Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata” adalah perbandingan antara jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan dengan jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi. Pelaksanaan putusan perkara perdata dilakukan oleh para pihak secara sukarela. Apabila para pihak tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi.

Bulan	Jumlah Putusan Perdata Yang Dimohonkan Eksekusi	Jumlah Permohonan Eksekusi Putusan Perdata Yang Diselesaikan tepat waktu	Jumlah Permohonan Eksekusi Putusan Perdata Yang Diselesaikan tidak tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
April	2	1	0	45%	50%	112%
Mei	15	13	3	45%	87%	194%
Juni	21	15	1	45%	72%	160%
Jumlah	29	38	4	45%	76%	170%

Capaian indikator Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata pada Triwulan II Tahun 2025 mencapai 170%. Selama periode April sampai dengan Juni 2025, terdapat 38 permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan tepat waktu, dengan 4 permohonan diselesaikan tidak tepat waktu. Realisasi indikator mencapai 76% dengan target yang ditetapkan sebesar 45%, sehingga capaian kinerja mencapai 170%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pengadilan dalam penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata telah melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh adanya monitoring dan evaluasi secara berkala

1.7 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Pendekatan Restorative

Indikator kinerja “Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Pendekatan Restorative” adalah perbandingan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dengan jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restorative.

Bulan	Jumlah Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	Jumlah Perkara Yang Memenuhi Kriteria Penerapan Pendekatan Keadilan Restorative tepat waktu	Jumlah Perkara Yang Memenuhi Kriteria Penerapan Pendekatan Keadilan Restorative tidak tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
April	0	0	0	12%	N/A	N/A
Mei	0	0	0	12%	N/A	N/A
Juni	0	0	0	12%	N/A	N/A
Jumlah	0	0	0	12%	N/A	N/A

Capaian indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Pendekatan Restorative pada Triwulan II Tahun 2025 mencapai 0%. Selama periode April sampai dengan Juni 2025, tidak ada perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif. Dengan demikian, realisasi indikator mencapai 0% sehingga capaian kinerja juga mencapai 0%.

1.8 PERSENTASE PERKARA YANG BERHASIL DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI

Indikator kinerja “Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi” adalah perbandingan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi.

Bulan	jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi	jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	jumlah perkara yang tidak berhasil diselesaikan melalui mediasi	Target	Realisasi	Capaian
April	15	0	15	3%	0%	0%
Mei	19	1	18	3%	6%	200%
Juni	24	1	23	3%	5%	167%
Jumlah	58	2	56	3%	3,45%	115%

Capaian indikator Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi pada Triwulan II Tahun 2025 mencapai 115%. Selama periode April sampai dengan Juni 2025, terdapat 58 perkara yang wajib dilakukan mediasi, dengan 2 perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi dan 56 perkara tidak berhasil diselesaikan melalui mediasi. Realisasi indikator mencapai 3,45% dengan target yang ditetapkan sebesar 3%, sehingga capaian kinerja mencapai 115%.Capaian tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah perkara yang

berhasil diselesaikan melalui mediasi masih relatif kecil dibandingkan jumlah perkara yang wajib dimediasi, realisasi yang dicapai telah melampaui target yang ditetapkan.

1.9 PERSENTASE PERKARA ANAK YANG BERHASIL DISELESAIKAN MELALUI DIVERSI

Indikator kinerja “Persentase Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi” adalah perbandingan antara jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi. Indikator ini untuk mengukur jumlah perkara anak yang diselesaikan dengan diversi.

Bulan	jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi	jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi	jumlah perkara anak yang tidak berhasil diversi	Target	Realisasi	Capaian
April	1	0	1	47%	0%	0%
Mei	1	0	1	47%	0%	0%
Juni	0	0	0	47%	N/A	N/A
Jumlah	2	0	2	47%	0%	0%

Capaian indikator Persentase Perkara Anak yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi pada Triwulan II Tahun 2025 mencapai 0%. Selama periode April sampai dengan Juni 2025, terdapat 2 perkara anak yang telah selesai proses diversi, namun tidak terdapat perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi. Dengan demikian, realisasi indikator mencapai 0% dari target yang telah ditetapkan sebesar 47%, sehingga capaian kinerja juga mencapai 0%. Tidak tercapainya target indikator ini disebabkan karena tidak tercapainya kesepakatan diversi sehingga penyelesaian perkara tetap dilanjutkan melalui proses peradilan sesuai ketentuan yang berlaku.

1.10 PERSENTASE PERKARA PERDATA TINGKAT PERTAMA YANG MENGGUNAKAN E-COURT

Indikator kinerja “Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Menggunakan E-Court” adalah perbandingan antara jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court dengan jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan.

Bulan	Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Diajukan	Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Diajukan Melalui E-Court	Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Diajukan secara manual	Target	Realisasi	Capaian
April	77	77	0	95%	100%	105%
Mei	89	89	0	95%	100%	105%
Juni	147	147	0	95%	100%	105%
Jumlah	313	313	0	95%	100%	105%

Capaian indikator Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang Menggunakan E-Court pada Triwulan II Tahun 2025 mencapai 105%. Selama periode April sampai dengan Juni 2025, terdapat 313 perkara perdata tingkat pertama yang diajukan, dan seluruhnya sebanyak 313 perkara diajukan melalui E-Court. Dengan demikian, realisasi indikator mencapai 100% dan telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 95%, sehingga capaian kinerja mencapai 105%.

1.11 PERSENTASE PERKARA PIDANA YANG DILIMPAHKAN SECARA ELEKTRONIK (E-BERPADU)

Indikator kinerja “Persentase Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)” adalah perbandingan antara jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dengan jumlah perkara pidana yang dilimpahkan.

Bulan	Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan	Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik	Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara manual	Target	Realisasi	Capaian
April	76	76	0	94%	1%	106%
Mei	121	119	2	94%	1%	105%
Juni	115	113	2	94%	1%	105%
Jumlah	312	304	4	94%	99%	105%

Capaian indikator Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu) pada Triwulan II Tahun 2025 mencapai 105%. Selama periode April sampai dengan Juni 2025,

terdapat 312 perkara pidana yang dilimpahkan, 304 perkara dilimpahkan secara elektronik melalui E-Berpadu dan 4 perkara dilimpahkan secara manual yakni perkara tindak pidana cepat. Realisasi indikator mencapai 99% dengan target yang ditetapkan sebesar 94%, sehingga capaian kinerja mencapai 105%.

1.12 PERSENTASE LAYANAN PERKARA PIDANA YANG DIAJUKAN SECARA ELEKTRONIK (E-BERPADU)

Indikator kinerja “Persentase Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu)” adalah perbandingan antara jumlah layanan perkara yang diajukan secara elektronik dengan jumlah layanan perkara pidana.

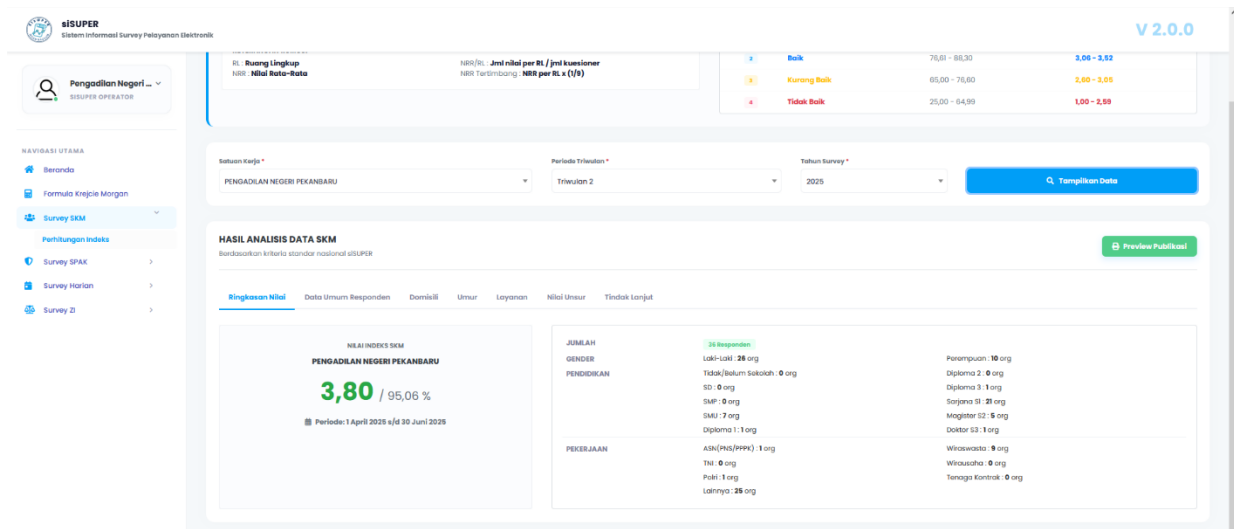
Bulan	jumlah layanan perkara pidana	jumlah layanan perkara yang diajukan secara elektronik	jumlah layanan perkara yang diajukan secara manual	Target	Realisasi	Capaian
April	276	276	0	95%	100%	105%
Mei	316	316	0	95%	100%	105%
Juni	441	441	0	95%	100%	105%
Jumlah	103	103	0	95%	100%	105%

Capaian indikator Persentase Layanan Perkara Pidana yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu) pada Triwulan II Tahun 2025 mencapai 105%. Selama periode April sampai dengan Juni 2025, seluruh layanan perkara pidana yang diajukan telah menggunakan aplikasi E-Berpadu. Dari 103 layanan perkara pidana seluruhnya diajukan secara elektronik sehingga realisasi indikator mencapai 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 95%. Dengan demikian capaian kinerja mencapai 105%.

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan berpedoman pada Permenpan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai indeks minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus ≥ 80 . Pengukuran menggunakan aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER) dilaksanakan per triwulan.



Pada Periode Triwulan II Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pekanbaru mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 99% dan melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar 94%. Capaian kinerja indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan adalah sebesar 105%, hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar layanan yang ditetapkan dan ketentuan peraturan perundangan - undangan yang mengaturnya.

3. Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Negeri Pekanbaru

Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Negeri Pekanbaru menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dilaksanakan per tahun dan berpedoman pada Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:

- 1) Kompetensi (40%)
- 2) Kinerja (30%)
- 3) Kualifikasi (25%)
- 4) Disiplin (5%)

3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Pekanbaru DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Pengukuran Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Pekanbaru DIPA (01) Badan Urusan Administrasi menggunakan aplikasi *My Integrated Treasury System (MyIntress)* Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dilaksanakan per triwulan dan berpedoman pada Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan yang terdiri dari:

- 1) Revisi DIPA (10%)
- 2) Penyerapan Anggaran (20%)
- 3) Penyelesaian Tagihan (10%)
- 4) Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)
- 5) Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)
- 6) Belanja Kontraktual (10%)
- 7) Pengelolaan UP dan TUP (10%)
- 8) Capaian Output (25%)

Pada Periode Triwulan II Tahun 2026, Pengadilan Negeri Pekanbaru mendapatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Pekanbaru DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebesar 99 dan melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar 99. Capaian kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Pekanbaru DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran Pengadilan Negeri Pekanbaru telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

MyIntress Cari Menu, contoh: Monitoring Tutup Periode

Tahun Anggaran: 2025 FIRANDA AL SATKER - 098849

Admin Anggaran Komitmen Bendahara Pembayaran Persediaan Aset Tetap Piutang Rekonsiliasi Akuntansi dan Pelaporan Tematik Referensi

Indikator Pelaksanaan Anggaran Satker

Filter: Filter PDF XLSX

Filter Aktif: PERIODE: 06

Q cari di halaman...

NO	PERIODE	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN			NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANGAN)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/ KONVERSI BOBOT)
							REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	NILAI ASPEK	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	NILAI ASPEK	CAPAIAN OUTPUT	NILAI ASPEK				
1	06 Juni	008	005	098849	PENGADILAN NEGERI PEKANBARU	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10,00	100,00 15,00	100,00	100,00 20,00	100,00 10,00	100,00 10,00	100,00 10,00	100,00 25,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00	100,00

3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Pekanbaru DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Pengukuran Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Pekanbaru DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menggunakan aplikasi *My Integrated Treasury System (MyIntress)* Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dilaksanakan per triwulan dan berpedoman pada Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan yang terdiri dari:

- 1) Revisi DIPA (10%)
- 2) Penyerapan Anggaran (20%)
- 3) Penyelesaian Tagihan (10%)
- 4) Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)
- 5) Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)
- 6) Belanja Kontraktual (10%)

7) Pengelolaan UP dan TUP (10%)

8) Capaian Output (25%)

Pada Periode Triwulan I Tahun 2026, Pengadilan Negeri Pekanbaru mendapatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Pekanbaru DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebesar 97 dan melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar 97. Capaian kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Pekanbaru DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran Pengadilan Negeri Pekanbaru telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

MyIntress

Cari Menu, contoh: Monitoring Belanja vs Persediaan

Tahun Anggaran: 2025

FIRANDA AL SATKER -099214

Admin

Anggaran

Komitmen

Bendahara

Pembayaran

Persediaan

Aset Tetap

Piutang

Rekonsiliasi

Akuntansi dan Pelaporan

Tematik

Referensi

Indikator Pelaksanaan Anggaran Satker

Filter

PDF

XLIX

FILTER AKTIF: PERIODE: 06

cari di halaman...

NO	PERIODE	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANGAN)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL / KONVERSI BOBOT)
							REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN II DIPA	NILAI ASPEK	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	NILAI ASPEK	CAPAIAN OUTPUT				
1	06 Juni	008	005	099214	PENGADILAN NEGERI PEKANBARU	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	100,00 10 10,00	100,00 25 25,00	100,00	80,00	80,00%	0,00	100,00

3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Negeri Pekanbaru DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Pengukuran Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Negeri Pekanbaru DIPA (01) Badan Urusan Administrasi menggunakan aplikasi *Monev Kemenkeu* Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dilaksanakan per tahun dan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan yang terdiri dari:

- 1) Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:
 - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)
 - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)
 - Agregasi Capaian RO Satker (30%)
- 2) Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker

3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Negeri Pekanbaru DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Pengukuran Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Negeri Pekanbaru DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menggunakan aplikasi *Monev Kemenkeu* Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dilaksanakan per tahun dan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan

Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan yang terdiri dari:

- 1) Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:
 - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)
 - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)
 - Agregasi Capaian RO Satker (30%)
- 2) Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker

3.6 Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Negeri Pekanbaru DIPA

Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. Pengukuran Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Negeri Pekanbaru menggunakan aplikasi *e-Sadewa* Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dilaksanakan per tahun dan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan

IV. Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagian besar target sudah tercapai dengan baik yakni diatas 100%, **namun masih ada indikator kinerja yang harus ditingkatkan realisasinya agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan.**

Sebagai tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru tetap melaksanakan pengendalian dan pemantauan secara berkala terhadap capaian Indikator Kinerja Utama guna memastikan konsistensi pencapaian target pada triwulan berikutnya. Monitoring dilakukan melalui evaluasi internal, rapat koordinasi, serta pengawasan masing-masing bagian.

V. Kesimpulan

Laporan Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Triwulan II Tahun 2025 menyajikan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang menggunakan alat ukur 12 (dua belas) indikator pada Sasaran I: Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern, dan 1 (satu) indikator pada Sasaran II: Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik dan 6 (enam) indikator pada Sasaran III: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Secara umum, rata-rata capaian seluruh indikator kinerja dinyatakan “Berhasil” karena dapat mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan ada beberapa indikator kinerja yang melampaui target. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain: adanya kebijakan, peningkatan fungsi pengawasan, peningkatan sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang.

VI. Rekomendasi

Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar selalu berupaya : Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap *stakeholder* komponen aparatur peradilan, masyarakat, dan *civil society* sebagai bahan integral dari pengadilan, penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara, Penguatan organisasi guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan dalam mengatasi kendala dan permasalahan yang ada.

Demikian Laporan Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Pekanbaru, 8 Juli 2025

Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru,

Bambang Trikoro

**LAPORAN
MONITORING, EVALUASI DAN
TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA
PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2025**



**PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
TAHUN 2025**

LAPORAN MONITORING, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT
CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
TRIWULAN III TAHUN 2025

I. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Keenam Pasal 18 dan 19;
- b. Rekomendasi Kementrian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditanda tangani sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) kedalam satu rencana aksi yang lebih detail dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.
- c. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
- d. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya

II. Capaian Kinerja

Hasil pengukuran capaian kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Periode Triwulan III Tahun 2025:

No	Sasaran		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	89%	92%	103%
		2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	95%	100%	105%
		3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	53%	55%	103%

	4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	72%	72%	100%	
	5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	92%	99%	108%	
	6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45%	28%	62%	
	7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	12%	6%	52%	
	8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	3%	1%	46%	
	9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	47%	N/A	N/A	
	10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	95%	100%	105%	
	11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	94%	99%	105%	
	12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95%	100%	105%	
Rata - Rata Capaian Sasaran Strategis I					90%	
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	94%	99%	105%
Rata - Rata Capaian Sasaran Strategis II					105%	
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang	1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83	N/A	N/A

Transparan dan Profesional	2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	99	100%	101%
	3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	97	100%	103%
	4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	100	N/A	N/A
	5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	78	N/A	N/A
	6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	N/A	N/A
Rata - Rata Capaian Sasaran Strategis III					102%
Rata - Rata Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025					99%

III. Analisa Capaian Kinerja

1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

1.1 Indikator persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

Indikator kinerja “Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Berikut rincian perkara yang diselesaikan tepat waktu periode triwulan III tahun 2025 :

Bulan	Jumlah perkara yang diselesaikan dibulan ini	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tidak tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
Juli	216	190	26	89%	88%	99%
Agustus	227	212	15	89%	94%	99%
September	244	230	14	89%	95%	107%
Jumlah	687	632	55	89%	92%	103%

Capaian indikator persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu selalu mencapai 101%. Pada periode triwulan III tahun 2025, jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 687 perkara dan sebanyak 632 perkara dapat diselesaikan tepat waktu, sedangkan 55 perkara diselesaikan tidak tepat waktu. Realisasi persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu mencapai 92% dan melebihi dari rata-rata target yang telah ditetapkan sebesar 89%. Hal ini menunjukkan Pengadilan Negeri Pekanbaru telah bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dan konsisten mewujudkan proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.

1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Indikator kinerja “Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak” adalah perbandingan jumlah Salinan putusan yang tersedia/dikirmkan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus.

Bulan	Perkara yang diputus bulan Ini	Jumlah Salinan Putusan Yang Tersedia/Dikirmkan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu	Jumlah salinan putusan perkara yang dikirimkan kepada pengadilan pengaju tidak tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
Juli	203	203	0	95%	100%	106%
Agustus	218	218	0	95%	100%	106%
Septemb er	242	242	0	95%	100%	106%
Jumlah	663	663	0	95%	100%	105%

Capaian Indikator Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak selalu mencapai 105% setiap bulannya. Pada periode triwulan III tahun 2025, jumlah perkara yang diputus sebanyak 663 perkara dan seluruh salinan putusan perkara tersebut dikirimkan kepada pengadilan pengaju secara tepat waktu. Hal ini menunjukkan terwujudnya penyelesaian perkara secara sederhana, efektif, transparan, tepat waktu, akuntabel, responsif dan modern pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

1.3 Presentase pengiriman pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan pk secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.

Indikator Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.

Capaian Indikator pengiriman pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan pk secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak mencapai 103% pada periode triwulan III tahun 2025.

Bulan	jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan pk yang diterima pengadilan pengaju	jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi pk yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu	jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi pk yang disampaikan kepada para pihak secara tidak tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
Juli	44	23	21	53%	53%	100%
Agustus	42	24	18	53%	58%	110%
September	57	31	26	53%	55%	104%
Jumlah	143	78	65	53%	55%	103%

1.4 Presentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan pk tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Indikator kinerja “Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak” adalah perbandingan jumlah Salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah Salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju.

Bulan	Jumlah Salinan Putusan Banding, Kasasi Dan PK Yang Diterima Pengadilan Pengaju	Jumlah Salinan Putusan Yang Dikirimkan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu	Jumlah Salinan Putusan Yang Dikirimkan Kepada Para Pihak Secara Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
Juli	21	18	3	72%	86%	120%
Agustus	24	14	10	72%	59%	82%
September	26	19	7	72%	73%	102%
Jumlah	71	51	20	72%	72%	100%

Capaian indikator persentase penyampaian salinan putusan banding, kasasi, dan PK kepada para pihak secara tepat waktu pada Triwulan III Tahun 2025 mencapai 100%. Selama periode Juli sampai dengan September 2025, Pengadilan menerima sebanyak 71 salinan putusan banding, kasasi, dan PK. Dari jumlah tersebut, sebanyak 51 salinan putusan berhasil disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dan 20 salinan putusan disampaikan tidak tepat waktu. Realisasi indikator mencapai 72% dengan target yang ditetapkan sebesar 72%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Capaian tersebut didukung oleh adanya evaluasi dan monitoring secara berkala, serta kerja sama dan komunikasi yang baik antara majelis hakim, panitera pengganti, dan bagian kepaniteraan dalam memastikan penyampaian salinan putusan kepada para pihak dapat dilakukan secara efektif dan tepat waktu.

1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Indikator kinerja “Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan” adalah perbandingan antara jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dengan jumlah putusan yang telah diminutasi.

periode triwulan III tahun 2025 :

Bulan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan tahun 2025	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori secara tepat waktu	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori secara tidak tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
-------	--	--	--	--------	-----------	---------

Juli	216	216	0	92%	100	109
Agustus	227	223	4	92%	99	108
September	244	241	3	92%	99	108
Jumlah	687	680	7	92%	99%	108%

Capaian indikator Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan pada Triwulan III Tahun 2025 mencapai 108%. Selama periode Juli sampai dengan September 2025, Pengadilan mengunggah sebanyak 687 putusan ke Direktori Putusan. Dari jumlah tersebut, 680 putusan diunggah secara tepat waktu dan 7 putusan diunggah secara tidak tepat waktu. Realisasi indikator mencapai 99% dengan target yang ditetapkan sebesar 92%, sehingga capaian kinerja mencapai 108%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan telah melaksanakan publikasi putusan secara optimal dan konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.6 Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata

Indikator kinerja “Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata” adalah perbandingan antara jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan dengan jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi. Pelaksanaan putusan perkara perdata dilakukan oleh para pihak secara sukarela. Apabila para pihak tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi.

Bulan	Jumlah Putusan Perdata Yang Dimohonkan Eksekusi	Jumlah Permohonan Eksekusi Putusan Perdata Yang Diselesaikan tepat waktu	Jumlah Permohonan Eksekusi Putusan Perdata Yang Diselesaikan tidak tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
Juli	7	4	3	45%	58%	129%
Agustus	7	1	6	45%	15%	34%
September	4	0	4	45%	0%	0%
Jumlah	18	5	13	45%	28%	62%

Capaian indikator Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata pada Triwulan III Tahun 2025 mencapai 62%. Selama periode Juli sampai dengan September 2025,

terdapat 18 permohonan eksekusi putusan perdata yang dimohonkan eksekusi, dengan 5 permohonan diselesaikan tepat waktu dan 13 permohonan diselesaikan tidak tepat waktu. Realisasi indikator mencapai 28% dengan target yang ditetapkan sebesar 45%, sehingga capaian kinerja mencapai 62%. Belum tercapainya target indikator ini disebabkan karena sebagian besar permohonan eksekusi pada periode pelaporan diselesaikan tidak tepat waktu, sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan percepatan penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata ke depannya.

1.7 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Pendekatan Restorative

Indikator kinerja “Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Pendekatan Restorative” adalah perbandingan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dengan jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restorative.

Bulan	Jumlah Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	Jumlah Perkara Yang Memenuhi Kriteria Penerapan Pendekatan Keadilan Restorative tepat waktu	Jumlah Perkara Yang Memenuhi Kriteria Penerapan Pendekatan Keadilan Restorative tidak tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
Juli	2	2	0	12%	100%	83%
Agustus	18	1	17	12%	6%	50%
September	28	0	28	12%	0%	0%
Jumlah	48	3	45	12%	6%	52%

Capaian indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Pendekatan Restorative pada Triwulan III Tahun 2025 mencapai 52%. Selama periode Juli sampai dengan September 2025, terdapat 48 perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3 perkara memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif tepat waktu.. Dengan demikian, realisasi indikator mencapai 6% dari target yang telah ditetapkan sebesar 12%, sehingga capaian kinerja mencapai 52%. Capaian

target indikator ini didukung oleh optimalnya penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif selama periode pelaporan berjalan.

1.8 Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator kinerja “Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi” adalah perbandingan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi.

Bulan	jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi	jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	jumlah perkara yang tidak berhasil diselesaikan melalui mediasi	Target	Realisasi	Capaian
Juli	27	0	27	3%	0%	0%
Agustus	26	1	25	3%	4%	133%
September	19	0	19	3%	0%	0%
Jumlah	72	1	71	3%	1%	46%

Capaian indikator Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi pada Triwulan III Tahun 2025 mencapai 46%. Selama periode Juli sampai dengan September 2025, terdapat 72 perkara yang wajib dilakukan mediasi, dengan 1 perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi tepat waktu. Realisasi indikator mencapai 1% dengan target yang ditetapkan sebesar 3%, sehingga capaian kinerja mencapai 46%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi masih relatif kecil dibandingkan jumlah perkara yang wajib dimediasi, diperlukan optimalisasi proses mediasi agar target capaian kinerja dapat terpenuhi secara maksimal ke depannya.

1.9 Persentase Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi

Indikator kinerja “Persentase Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi” adalah perbandingan antara jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi

dengan jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi. Indikator ini untuk mengukur jumlah perkara anak yang diselesaikan dengan diversi.

Bulan	jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi	jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi	jumlah perkara anak yang tidak berhasil diversi	Target	Realisasi	Capaian
Juli	0	0	0	47%	0	0
Agustus	0	0	0	47%	0	0
September	0	0	0	47%	0	0
Jumlah	0	0	0	47%	N/A	N/A

Capaian indikator Persentase Perkara Anak yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi pada Triwulan III Tahun 2025 mencapai 0%. Selama periode Juli sampai dengan September 2025, tidak terdapat perkara anak yang menjalani proses diversi. Dengan demikian, realisasi indikator mencapai N/A dari target yang telah ditetapkan sebesar 47%, sehingga capaian kinerja juga mencapai N/A. Tidak tercapainya target indikator ini disebabkan karena tidak adanya perkara anak yang masuk atau memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui mekanisme diversi selama periode pelaporan berjalan.

1.10 Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Menggunakan E-Court

Indikator kinerja “Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Menggunakan E-Court” adalah perbandingan antara jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court dengan jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan.

Bulan	Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Diajukan	Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Diajukan Melalui E-Court	Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Diajukan secara manual	Target	Realisasi	Capaian
Juli	155	155	0	95%	100%	105%
Agustus	120	120	0	95%	100%	105%

September	133	133	0	95%	100%	105%
Jumlah	408	408	0	95%	100%	105%

Capaian indikator Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang Menggunakan E-Court pada Triwulan III Tahun 2025 mencapai 105%. Selama periode Juli sampai dengan September 2025, terdapat 408 perkara perdata tingkat pertama yang diajukan, dan seluruhnya sebanyak 408 perkara diajukan melalui E-Court secara tepat waktu. Dengan demikian, realisasi indikator mencapai 100% dan telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 95%, sehingga capaian kinerja mencapai 105%.

1.11 Persentase Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)

Indikator kinerja “Persentase Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)” adalah perbandingan antara jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dengan jumlah perkara pidana yang dilimpahkan.

Bulan	Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan	Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik	Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara manual	Target	Realisasi	Capaian
Juli	175	174	1	94%	99%	105%
Agustus	123	120	3	94%	98%	104%
September	128	127	1	94%	99%	105%
Jumlah	426	421	5	94%	99%	105%

Capaian indikator Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu) pada Triwulan III Tahun 2025 mencapai 105%. Selama periode Juli sampai dengan September 2025, terdapat 426 perkara pidana yang dilimpahkan, dengan 421 perkara dilimpahkan secara elektronik melalui E-Berpadu dan 5 perkara dilimpahkan secara manual yakni perkara tindak pidana cepat.. Realisasi indikator mencapai 99% dengan target yang ditetapkan sebesar 94%, sehingga capaian kinerja mencapai 105%.

1.12 Persentase Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu)

Indikator kinerja “Persentase Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu)” adalah perbandingan antara jumlah layanan perkara yang diajukan secara elektronik dengan jumlah layanan perkara pidana.

Bulan	jumlah layanan perkara pidana	jumlah layanan perkara yang diajukan secara elektronik	Jumlah perkara pidana tingkat banding yang diajukan secara manual	Target	Realisasi	Capaian
Juli	438	438	0	95%	100%	105%
Agustus	376	376	0	95%	100%	105%
September	410	410	0	95%	100%	105%
Jumlah	1224	1224	0	95%	100%	105%

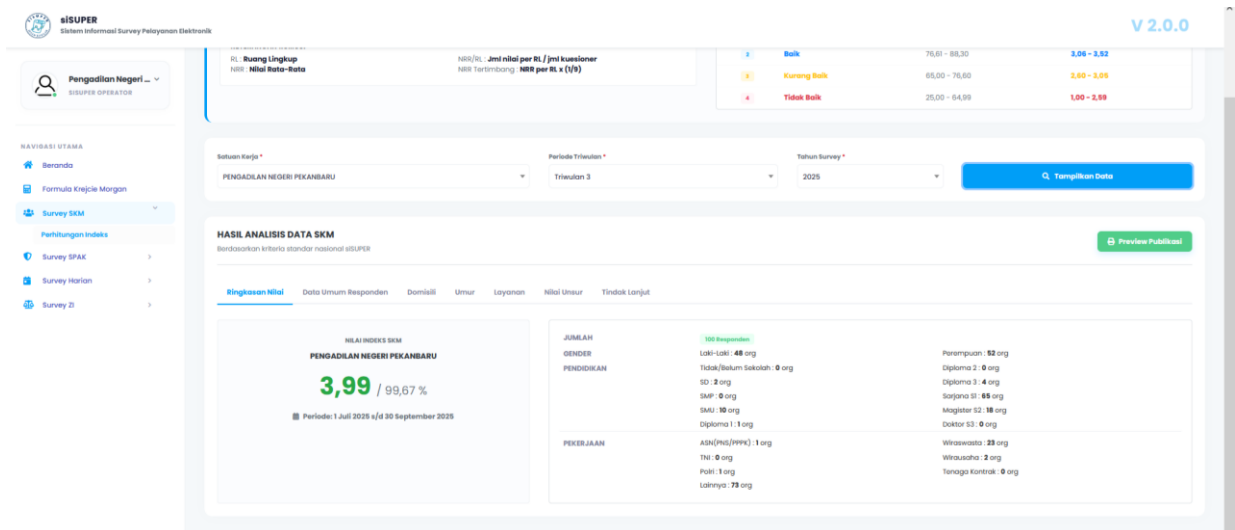
Capaian indikator Persentase Layanan Perkara Pidana yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu) pada Triwulan III Tahun 2025 mencapai 105%. Selama periode Juli sampai dengan September 2025, seluruh layanan perkara pidana yang diajukan telah menggunakan aplikasi E-Berpadu. Dari 1224 layanan perkara pidana yang diajukan, seluruhnya atau 1224 layanan diajukan secara elektronik, sehingga realisasi indikator mencapai 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 95%. Dengan demikian, capaian kinerja mencapai 105%.

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan berpedoman pada Permenpan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai indeks minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus ≥ 80 . Pengukuran menggunakan aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER) dilaksanakan per triwulan.

Pada Periode Triwulan III Tahun 2026, Pengadilan Negeri Pekanbaru mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 99% dan melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar 94%. Capaian kinerja indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan adalah sebesar 105%, hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar layanan yang ditetapkan dan ketentuan peraturan perundangan - undangan yang mengaturnya.



3. Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Negeri Pekanbaru

Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Negeri Pekanbaru menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dilaksanakan per tahun dan berpedoman pada Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:

- 1) Kompetensi (40%)
- 2) Kinerja (30%)
- 3) Kualifikasi (25%)
- 4) Disiplin (5%)

3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Pekanbaru DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Pengukuran Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Pekanbaru DIPA (01) Badan Urusan Administrasi menggunakan aplikasi *My Integrated Treasury System (MyIntress)* Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dilaksanakan per triwulan dan berpedoman pada Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan yang terdiri dari:

- 1) Revisi DIPA (10%)
- 2) Penyerapan Anggaran (20%)
- 3) Penyelesaian Tagihan (10%)
- 4) Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)
- 5) Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)
- 6) Belanja Kontraktual (10%)

- 7) Pengelolaan UP dan TUP (10%)
- 8) Capaian Output (25%)

Pada Periode Triwulan III Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pekanbaru mendapatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Pekanbaru DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebesar 100. Target yang telah ditetapkan yakni sebesar 99. Capaian kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Pekanbaru DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebesar 101%, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran Pengadilan Negeri Pekanbaru telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

MyIntress Cari Menu, contoh: Daftar SP2D per Satker Tahun Anggaran: 2025 FIRANDA AL SATKER-098849

Admin Anggaran Komitmen Bendahara Pembayaran Persediaan Aset Tetap Piutang Rekonsiliasi Akuntansi dan Pelaporan Tematik Referensi

Indikator Pelaksanaan Anggaran Satker

Filter PDF XLSX

FILTER AKTIF: PERIODE: 09

NO	PERIODE	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANGAN)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
							REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	NILAI ASPEK	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	NILAI ASPEK	CAPAIAN OUTPUT				
1	09 September	008	005	098849	PENGADILAN NEGERI PEKANBARU	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00	100,00 25 25,00	100,00	100,00%	0,00	100,00

3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Pekanbaru DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Pengukuran Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Pekanbaru DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menggunakan aplikasi *My Integrated Treasury System (MyIntress)* Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dilaksanakan per triwulan dan berpedoman pada Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan yang terdiri dari:

- 1) Revisi DIPA (10%)
- 2) Penyerapan Anggaran (20%)
- 3) Penyelesaian Tagihan (10%)
- 4) Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)
- 5) Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)
- 6) Belanja Kontraktual (10%)
- 7) Pengelolaan UP dan TUP (10%)
- 8) Capaian Output (25%)

Pada Periode Triwulan III Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pekanbaru mendapatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Pekanbaru DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebesar 100. Target yang telah ditetapkan yakni sebesar 97. Capaian kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Pekanbaru DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah sebesar 103. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran Pengadilan Negeri Pekanbaru telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

MyIntress Cari Menu, contoh: Monitoring Belanja vs Persediaan

Tahun Anggaran: 2025 FIRANDA AL SATKER-099214

Admin Anggaran Komitmen Bendahara Pembayaran Persediaan Aset Tetap Piutang Rekonsiliasi Akuntansi dan Pelaporan Tematik Referensi

Indikator Pelaksanaan Anggaran Satker

FILTER AKTIF: PERIODE: 09

NO	PERIODE	KODE SPN	KODE SA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KONVERSI ROBOT	DEFENSIASI BPM (PENGANGKARAN)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI ROBOT)
							REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	NILAI ASPEK	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	NILAI ASPEK	CAPAIAN OUTPUT	NILAI ASPEK				
1	09 September	008	005	099214	PENGADILAN NEGERI PEKANBARU	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	94,08 15 14,11	97,04	100,00 20 20,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	100,00 10 10,00	100,00	100,00 25 25,00	100,00	79,11	80,00%	0,00	96,89

3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Negeri Pekanbaru DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Pengukuran Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Negeri Pekanbaru DIPA (01) Badan Urusan Administrasi menggunakan aplikasi *Money Kemenkeu* Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dilaksanakan per tahun dan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan yang terdiri dari:

- 1) Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:
 - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)
 - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)
 - Agregasi Capaian RO Satker (30%)
- 2) Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker

3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Negeri Pekanbaru DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Pengukuran Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Negeri Pekanbaru DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menggunakan aplikasi *Money Kemenkeu* Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dilaksanakan per tahun dan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan yang terdiri dari:

- 1) Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:

- Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)
- Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)
- Agregasi Capaian RO Satker (30%)

2) Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker

3.6 Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Negeri Pekanbaru

Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. Pengukuran Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Negeri Pekanbaru menggunakan aplikasi *e-Sadewa* Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dilaksanakan per tahun dan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan

IV. Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja Triwulan III Tahun 2025 terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagian besar target sudah tercapai dengan baik yakni diatas 100%, **namun masih ada indikator kinerja yang harus ditingkatkan realisasinya agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan.**

Sebagai tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru tetap melaksanakan pengendalian dan pemantauan secara berkala terhadap capaian Indikator Kinerja Utama guna memastikan konsistensi pencapaian target pada triwulan berikutnya. Monitoring dilakukan melalui evaluasi internal, rapat koordinasi, serta pengawasan masing-masing bagian.

V. Kesimpulan

Laporan Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Triwulan III Tahun 2025 menyajikan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang menggunakan alat ukur 12 (dua belas) indikator pada Sasaran I: Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern, dan 1 (satu) indikator pada Sasaran II: Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik dan 6 (enam) indikator pada Sasaran III: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Secara umum, rata-rata capaian seluruh indikator kinerja dinyatakan “Berhasil” karena dapat mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan ada beberapa indikator kinerja yang melampaui target. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain: adanya kebijakan, peningkatan fungsi pengawasan, peningkatan sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang.

VI. Rekomendasi

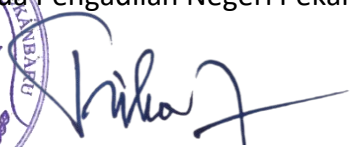
Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar selalu berupaya : Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap *stakeholder* komponen aparatur peradilan, masyarakat, dan *civil society* sebagai bahan integral dari pengadilan, penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara, Penguatan organisasi guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan dalam mengatasi kendala dan permasalahan yang ada.

Demikian Laporan Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Pekanbaru, 9 Oktober 2025

Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru,


Bambang Trigoro

**LAPORAN
MONITORING, EVALUASI DAN
TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA
PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2025**



**PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
TAHUN 2025**

LAPORAN MONITORING, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT
CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
TRIWULAN IV TAHUN 2025

I. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Keenam Pasal 18 dan 19;
- b. Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditanda tangani sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) kedalam satu rencana aksi yang lebih detail dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.
- c. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
- d. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya

II. Capaian Kinerja

Hasil pengukuran capaian kinerja Pengadilan Tinggi Riau Periode Triwulan IV Tahun 2025:

No	Sasaran		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	89%	94%	105%
		2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	95%	100%	105%
		3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	53%	65%	123%
		4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK	72%	91%	126%

			tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak			
		5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	92%	96%	104%
		6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45%	0%	0%
		7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	12%	16%	136%
		8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	3%	5%	169%
		9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	47%	100%	213%
		10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	95%	100%	105%
		11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	94%	99%	105%
		12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95%	100%	105%
Rata - Rata Capaian Sasaran Strategis I						116%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	94%	99%	105%
Rata - Rata Capaian Sasaran Strategis II						105%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83	N/A	N/A
		2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	99	100%	101%

	Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)			
3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	97	100%	103%
4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	100	N/A	N/A
5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	78	N/A	N/A
6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	N/A	N/A
Rata - Rata Capaian Sasaran Strategis III				102%
Rata - Rata Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025				107%

III. Analisa Capaian Kinerja

1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

1.1 Indikator persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

Indikator kinerja “Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Berikut rincian perkara yang diselesaikan tepat waktu periode triwulan IV tahun 2025 :

Bulan	Jumlah perkara yang diselesaikan dibulan ini	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tidak tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
Oktober	288	271	17	89%	94%	106%
November	220	209	11	89%	95%	107%
Desember	264	242	22	89%	92%	104%
Jumlah	772	722	50	89%	94%	105%

Capaian indikator persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu selalu mencapai 105% Pada periode triwulan IV tahun 2025, jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 772 perkara dan seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu. Realisasi persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu mencapai 94% dan melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 89%. Hal ini menunjukkan Pengadilan Negeri Pekanbaru telah bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dan konsisten mewujudkan proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.

1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Indikator kinerja “Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak” adalah perbandingan jumlah Salinan putusan yang tersedia/dikirmkan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus.

Capaian Indikator Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak selalu mencapai 105% setiap bulannya. Pada periode triwulan IV tahun 2025, jumlah perkara yang diputus sebanyak 738 perkara dan seluruh salinan putusan perkara tersebut dikirimkan kepada pengadilan pengaju secara tepat waktu. Hal ini menunjukkan terwujudnya penyelesaian perkara secara sederhana, efektif, transparan, tepat waktu, akuntabel, responsif dan modern pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Bulan	Perkara yang diputus bulan Ini	Jumlah Salinan Putusan Yang Tersedia/Dikirmkan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu	Jumlah salinan putusan perkara yang dikirimkan kepada pengadilan pengaju tidak tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
Oktober	275	275	0	95%	100%	106%
November	213	213	0	95%	100%	106%
Desember	250	250	0	95%	100%	106%
Jumlah	738	738	0	95%	100%	105%

1.3 Presentase pengiriman pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan pk secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.

Indikator Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.

Capaian Indikator pengiriman pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan pk secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak mencapai 103% pada periode triwulan IV tahun 2025.

Bulan	Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan pk yang di terima pengadilan pengaju	jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi pk yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu	jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi pk yang disampaikan kepada para pihak secara tidak tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
Oktober	62	44	18	53%	71%	134%
November	39	20	19	53%	52%	99%
Desember	39	27	12	53%	70%	132%
Jumlah	140	91	49	53%	65%	123%

Capaian indikator persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan mencapai 123% Pada periode triwulan IV tahun 2025, jumlah putusan perkara yang telah diminutasi sebanyak 140 perkara dan seluruhnya telah diunggah pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi. Realisasi persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan mencapai 65% dan melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 53%.

Capaian tersebut didukung oleh karena adanya evaluasi dan monitoring secara berkala, dan karena adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara majelis hakim, panitera pengganti, dan bagian kepaniteraan.

1.4 Presentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan pk tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Indikator kinerja “Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak” adalah perbandingan jumlah Salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah Salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju.

Bulan	Jumlah Salinan Putusan Banding, Kasasi Dan PK Yang Diterima Pengadilan Pengaju	Jumlah salinan putusan yang di kirimkan kepada para pihak secara tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan Yang Dikirimkan Kepada Para Pihak Secara tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
Oktober	31	35	4	72%	113%	157%
November	23	11	12	72%	48%	67%
Desember	21	22	1	72%	105%	146%
Jumlah	75	68	17	72%	91%	126%

Capaian indikator persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan mencapai 126% Pada periode triwulan IV tahun 2025, jumlah putusan perkara yang telah diminutasi sebanyak 75 perkara dan seluruhnya telah diunggah pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi. Realisasi persentase putusan pengadilan yang dikirimkan pada direktori putusan mencapai 91% dan melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 72%.

Capaian tersebut didukung oleh karena adanya evaluasi dan monitoring secara berkala, dan karena adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara majelis hakim, panitera pengganti, dan bagian kepaniteraan.

1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Indikator kinerja “Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan” adalah perbandingan antara jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dengan jumlah putusan yang telah diminutasi.

Bulan	Jumlah putusan yang telah diminutasi tahun 2025	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan tahun 2025	Jumlah putusan yang tidak diunggah pada direktori putusan tahun 2025	Target	Realisasi	Capaian
Oktober	288	262	26	92%	91%	99%
November	220	216	4	92%	99%	108%
Desember	264	264	0	92%	100%	109%
Jumlah	772	742	30	92%	96%	104%

Capaian indikator Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan pada Triwulan IV Tahun 2025 mencapai 104%. Pengadilan mengunggah sebanyak 772 putusan ke Direktori Putusan. Dari jumlah tersebut, 742 putusan diunggah secara tepat waktu. Realisasi indikator mencapai 96% dengan target yang ditetapkan sebesar 92%, sehingga capaian kinerja mencapai 104%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan telah melaksanakan publikasi putusan secara optimal dan konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.6. Presentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata

Indikator kinerja “Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata” adalah perbandingan antara jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan dengan jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi.

Bulan	Jumlah Putusan Perdata Yang Dimohonkan Eksekusi	Jumlah Permohonan Eksekusi Putusan Perdata Yang Diselesaikan	Jumlah Permohonan Eksekusi Putusan Perdata Yang Tidak Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
Oktober	2	0	2	45%	0%	0%
November	2	0	2	45%	0%	0%
Desember	3	0	3	45%	0%	0%
Jumlah	7	0	7	45%	0%	0%

Capaian indikator Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata pada Triwulan IV Tahun 2025 yakni 0%. terdapat 7 permohonan eksekusi putusan perdata, tidak

ada permohonan eksekusi yang diselesaikan pada triwulan IV. Realisasi indikator mencapai 0% dengan target yang ditetapkan sebesar 45%, sehingga capaian kinerja 0%.

1.7. Persentase perkara yang diselesaikan melalui pendekatan restorative

Indikator kinerja “Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Pendekatan Restorative” adalah perbandingan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dengan jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restorative

Bulan	Jumlah Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	Jumlah Perkara Yang Memenuhi Kriteria Penerapan Pendekatan Keadilan Restorative	Jumlah Perkara Yang tidak Memenuhi Kriteria Penerapan Pendekatan Keadilan Restorative	Target	Realisasi	Capaian
Oktober	40	3	37	12%	8%	63%
November	21	6	15	12%	29%	238%
Desember	31	6	25	12%	19%	161%
Jumlah	92	15	77	12%	16%	136%

Capaian indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Pendekatan Restorative pada Triwulan IV Tahun 2025 mencapai 136%, Realisasi indikator mencapai 16% dengan target yang ditetapkan sebesar 12%, sehingga capaian kinerja mencapai 136%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan telah melaksanakan publikasi putusan secara optimal dan konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Indikator kinerja “Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi” adalah perbandingan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi.

Bulan	jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi Th. 2025	jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	jumlah perkara yang tidak berhasil diselesaikan melalui mediasi	Target	Realisasi	Capaian
Oktober	37	2	35	3%	6%	180%
November	25	1	24	3%	4%	133%
Desember	17	1	16	3%	6%	196%
Jumlah	79	4	75	3%	5%	169%

Capaian indikator Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi pada Triwulan IV Tahun 2025 mencapai 169%. terdapat 79 perkara yang wajib dilakukan mediasi, dengan 4 perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi. Realisasi indikator mencapai 5% dengan target yang ditetapkan sebesar 3%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi masih relatif kecil dibandingkan jumlah perkara yang wajib dimediasi, realisasi yang dicapai telah melampaui target yang ditetapkan.

1.9. Presentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi

Indikator kinerja “Persentase Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi” adalah perbandingan antara jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi. Indikator ini untuk mengukur jumlah perkara anak yang diselesaikan dengan diversi.

Bulan	jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi	jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi	jumlah perkara anak yang tidak berhasil diversi	Target	Realisasi	Capaian
Oktober	0	0	0	47%	N/A	N/A
November	1	1	0	47%	100%	213%
Desember	0	0	0	47%	N/A	N/A
Jumlah	1	1	0	47%	100%	213%

Capaian indikator Persentase Perkara Anak yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi pada Triwulan IV Tahun 2025 mencapai 213%. terdapat 1 perkara anak yang telah selesai proses diversi. Realisasi indikator mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 47%.

1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court

Indikator kinerja “Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Menggunakan E-Court” adalah perbandingan antara jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court dengan jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan.

Bulan	Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Diajukan	Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Diajukan Melalui E-Court	Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Diajukan manual	Target	Realisasi	Capaian
Oktober	135	135	0	95%	100%	106%
November	105	105	0	95%	100%	106%
Desember	121	121	0	95%	100%	106%
Jumlah	361	361	0	95%	100%	105%

Capaian indikator Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang Menggunakan E-Court pada Triwulan IV Tahun 2025 mencapai 105%. Terdapat 361 perkara perdata tingkat pertama yang diajukan, dan seluruhnya sebanyak 361 perkara diajukan melalui E-Court. Dengan demikian, realisasi indikator mencapai 100% dan telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 95%

1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)

Indikator kinerja “Persentase Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)” adalah perbandingan antara jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dengan jumlah perkara pidana yang dilimpahkan. Aplikasi e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

Bulan	Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan	Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik	Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara manual	Target	Realisasi	Capaian
Oktober	141	138	3	94%	98%	104%
November	111	110	1	94%	99%	105%
Desember	145	145	0	94%	100%	106%
Jumlah	397	393	10	94%	99%	105%

Capaian indikator Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu) pada Triwulan IV Tahun 2025 mencapai 105%.terdapat 397 perkara pidana yang dilimpahkan, dengan 393 perkara dilimpahkan secara elektronik melalui E-Berpadu dan 10 perkara dilimpahkan secara manual yakni perkara tindak pidana cepat. Realisasi indikator mencapai 99% target yang ditetapkan sebesar 94%

1.12.Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- berpandu)

Indikator kinerja “Persentase Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu)” adalah perbandingan antara jumlah layanan perkara yang diajukan secara elektronik dengan jumlah layanan perkara pidana.

Bulan	jumlah layanan perkara pidana	jumlah layanan perkara yang diajukan secara elektronik	jumlah layanan perkara yang diajukan secara manual	Target	Realisasi	Capaian
Oktober	397	397	0	95%	100%	106%
November	302	302	0	95%	100%	106%
Desember	304	304	0	95%	100%	106%
Jumlah	1.003	1.003	0	95%	100%	105%

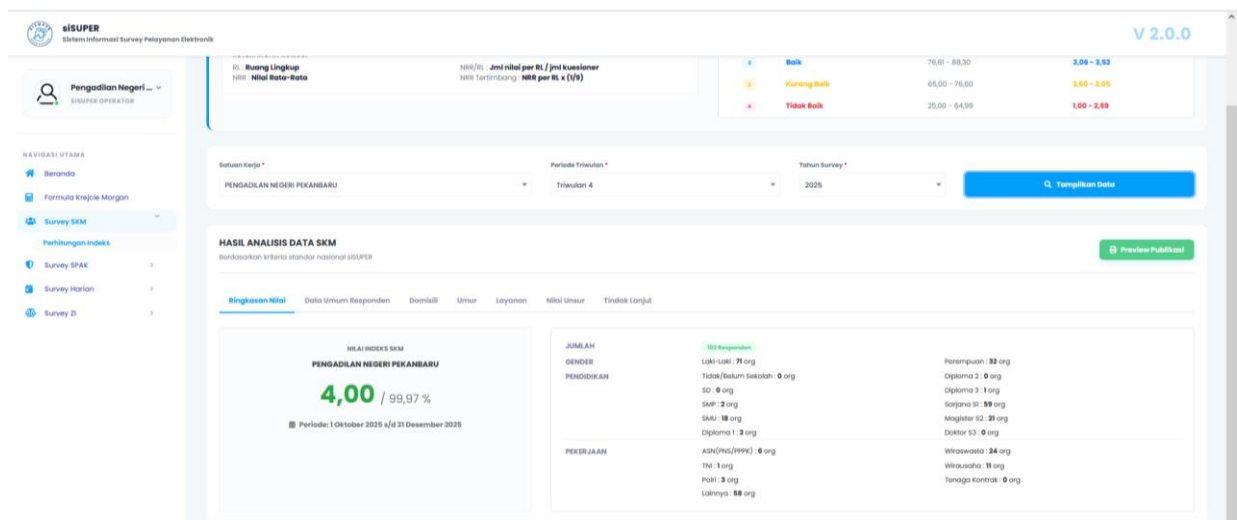
Capaian indikator Persentase Layanan Perkara Pidana yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu) pada Triwulan IV Tahun 2025 mencapai 105%. seluruh layanan perkara pidana yang diajukan telah menggunakan aplikasi E-Berpadu. Dari 1.003 layanan perkara pidana yang diajukan, seluruhnya atau 1.003 layanan diajukan secara elektronik, sehingga realisasi indikator mencapai 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 95%.

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan berpedoman pada Permenpan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai indeks minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus ≥ 80 . Pengukuran menggunakan aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER) dilaksanakan per triwulan.

Pada Periode Triwulan IV Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pekanbaru mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 99% dan melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar 94%. Capaian kinerja indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan adalah sebesar 105%, hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar layanan yang ditetapkan dan ketentuan peraturan perundangan - undangan yang mengaturnya.



3. Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN Pengadilan Negeri Pekanbaru

Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Negeri Pekanbaru menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dilaksanakan per tahun dan berpedoman pada Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:

- 1) Kompetensi (40%)
- 2) Kinerja (30%)
- 3) Kualifikasi (25%)
- 4) Disiplin (5%)

3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Pekanbaru DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Pengukuran Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Pekanbaru DIPA (01) Badan Urusan Administrasi menggunakan aplikasi *My Integrated Treasury System (MyIntress)* Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dilaksanakan per triwulan dan berpedoman pada Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan yang terdiri dari:

- 1) Revisi DIPA (10%)
- 2) Penyerapan Anggaran (20%)
- 3) Penyelesaian Tagihan (10%)
- 4) Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)
- 5) Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)
- 6) Belanja Kontraktual (10%)
- 7) Pengelolaan UP dan TUP (10%)
- 8) Capaian Output (25%)

Pada Periode Triwulan IV Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pekanbaru mendapatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Pekanbaru DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebesar 100 dan melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar 99. Capaian kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebesar 101%, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran Pengadilan Negeri Pekanbaru telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.



Cari Menu, contoh: Monitoring Tutup Periode

Tahun Anggaran: 2025

FIRANDA AL SATKER-098849

Admin
Anggaran
Komitmen
Bendahara
Pembayaran
Persediaan
Aset Tetap
Piutang
Rekonsiliasi
Akuntansi dan Pelaporan
Tematik
Lainnya

Indikator Pelaksanaan Anggaran Satker

Filter
PDF
XLSX

FILTER AKTIF: PERIODE: 12

cari di halaman...

NO	PERIODE	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN			NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANGAN)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/ KONVERSI BOBOT)
							REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	NILAI ASPEK	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	NILAI ASPEK	CAPAIAN OUTPUT	NILAI ASPEK				
1	12 Desember	008	005	098849	PENGADILAN NEGERI PEKANBARU	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10,00	100,00 15,00	100,00	100,00 20,00	93,33 10,00	100,00 10,00	100,00 10,00	98,33	100,00 25,00	100,00 25,00	99,33	100,00%	0,00	99,33

3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Pekanbaru DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Pengukuran Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Pekanbaru DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menggunakan aplikasi *My Integrated Treasury System (MyIntress)* Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dilaksanakan per triwulan dan berpedoman pada Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan yang terdiri dari:

- 1) Revisi DIPA (10%)
2) Penyerapan Anggaran (20%)
3) Penyelesaian Tagihan (10%)
4) Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)
5) Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)
6) Belanja Kontraktual (10%)
7) Pengelolaan UP dan TUP (10%)
8) Capaian Output (25%)

Pada Periode Triwulan IV Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pekanbaru mendapatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Pekanbaru DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebesar 100 dan melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar 97. Capaian kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Pekanbaru DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah sebesar 103, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran Pengadilan Negeri Pekanbaru telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

MyIntress Cari Menu, contoh: Tema APBN

Tahun Anggaran: 2025 FIRANDA AL SATKER-099214

Admin Anggaran Komitmen Bendahara Pembayaran Persediaan Aset Tetap Piutang Rekonsiliasi Akuntansi dan Pelaporan Tematik Referensi

Indikator Pelaksanaan Anggaran Satker

Filter: PERIODE: 12

NO	PERIODE	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANGAN)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/ KONVERSI BOBOT)
							REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN B/DIPA	NILAI ASPEK	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	NILAI ASPEK	CAPAIAN OUTPUT	NILAI ASPEK				
1	12 Desember	008	005	099214	PENGADILAN NEGERI PEKANBARU	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	94,74 15 14,21	97,37	100,00 20 20,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	100,00 10 10,00	100,00	94,17 25 23,54	94,17	77,75	80,00%	0,00	97,19

3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Negeri Pekanbaru DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Pengukuran Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Negeri Pekanbaru DIPA (01) Badan Urusan Administrasi menggunakan aplikasi *Monev Kemenkeu* Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dilaksanakan per tahun dan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan yang terdiri dari:

- 1) Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:
 - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)
 - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)
 - Agregasi Capaian RO Satker (30%)
- 2) Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker

3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Negeri Pekanbaru DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Pengukuran Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Negeri Pekanbaru DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menggunakan aplikasi *Monev Kemenkeu* Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dilaksanakan per tahun dan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan yang terdiri dari:

- 1) Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:
 - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)
 - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)
 - Agregasi Capaian RO Satker (30%)
- 2) Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker

3.6 Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Negeri Pekanbaru

Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. Pengukuran Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Tinggi Riau menggunakan aplikasi *e-Sadewa* Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dilaksanakan per tahun dan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan

IV. Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025 terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagian besar target sudah tercapai dengan baik yakni diatas 100%, **namun masih ada indikator kinerja yang harus ditingkatkan realisasinya agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan.**

Sebagai tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru tetap melaksanakan pengendalian dan pemantauan secara berkala terhadap capaian Indikator Kinerja Utama guna memastikan konsistensi pencapaian target pada triwulan berikutnya. Monitoring dilakukan melalui evaluasi internal, rapat koordinasi, serta pengawasan masing-masing bagian.

V. Kesimpulan

Laporan Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Triwulan IV Tahun 2025 menyajikan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang menggunakan alat ukur 12 (dua belas) indikator pada Sasaran I: Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern, dan 1 (satu) indikator pada Sasaran II: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik dan 6 (enam) indikator pada Sasaran III: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Secara umum, rata-rata capaian seluruh indikator kinerja dinyatakan “Berhasil” yakni 107% karena dapat mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan ada beberapa indikator kinerja yang melampaui target. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain: adanya kebijakan, peningkatan fungsi pengawasan, peningkatan sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang.

VI. Rekomendasi

Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar selalu berupaya : Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap

stakeholder komponen aparaturnya peradilan, masyarakat, dan *civil society* sebagai bahan integral dari pengadilan, penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara, Penguatan organisasi guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan dalam mengatasi kendala dan permasalahan yang ada.

Demikian Laporan Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut Capaian Kinerja Triwulan IV tahun 2025 dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Pekanbaru, 15 Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru,


Bambang Trikoro